



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**



**KECAMATAN BUKIK BARISAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Bukik Barisan telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi pada unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Nomor 061/10/Org-LK/2019 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020, Perjanjian Kinerja tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bukik Barisan Tahun Anggaran 2020. LKjIP Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan

kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Banja Loweh, Januari 2021

CAMAT BUKIK BARISAN



WARDI, S.Pd.M.Pd

NIP. 19651220 198603 1 005

Ringkasan Eksekutif

Penyusunan laporan kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan serta memberikan pelayanan publik. Proses Penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan.

Laporan kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan sistematika penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Taata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana melaporkan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Kusus untuk pengukuran digunakan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	Ii
Daftar Tabel.....	Iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Gambar.....	
Bab I : PENDAHULUAN	1-7
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1-2
1.2. Struktur Organisasi.....	2-4
1.3. Sumberdaya Pegawai/Aparatur.....	4-5
1.4. Isu-isu Strategis dan permasalahan Umum yang di hadapi.....	6-7
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
Bab II : Perencanaan dan perjanjian Kinerja	8-13
2.1. Rencana Strategis(Renstra) Kecamatan Bukik Barisan	8-12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	12-13
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA	14-34
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja..	14
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	14-15
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	16-27
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran.....	27-30
3.5. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan).....	30-34
Bab IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang.....	35-36
Lampiran	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1	Sumberdaya Manusia.....	4-5
2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
3	Perjanjian Kinerja tahun 2020.....	12-13
4	Klasifikasi Penilaian dan Kategori PenilaianKeberhasilan / Kegagalan.....	15
5	Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020.....	16
6	Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	23-31
7	Realisasi Anggaran.....	27-35

DAFTAR GRAFIK

1	Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2019 dan 2020	18
2	Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 dan 2020.....	19
3	Target dan Realisasi Status Nagari 2019 dan 2020.....	21
4	Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB tepat Waktu 2019 dan 2020.....	22
5	Target dan Realisasi badan Usaha Nagari yang aktif Tahun 2019 dan 2020.....	24

DAFTAR GAMBAR

1	Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bukik Barisan.....	20
2	Rapat Koordinasi antara Camat dengan Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat tentang perkembangan Nagari.....	23
3	Pendampingan Penyusunan APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan Bukik Barisan.....	23
4	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Banja Loweh Bidang Usaha Perternakan 2019 dan 2020.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2020. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2016-2021 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja

Tahunan 2020 dengan Sasaran RPJMD 2016-2021 dan Indikator Kinerja 2016-2021.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Bukik Barisan sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

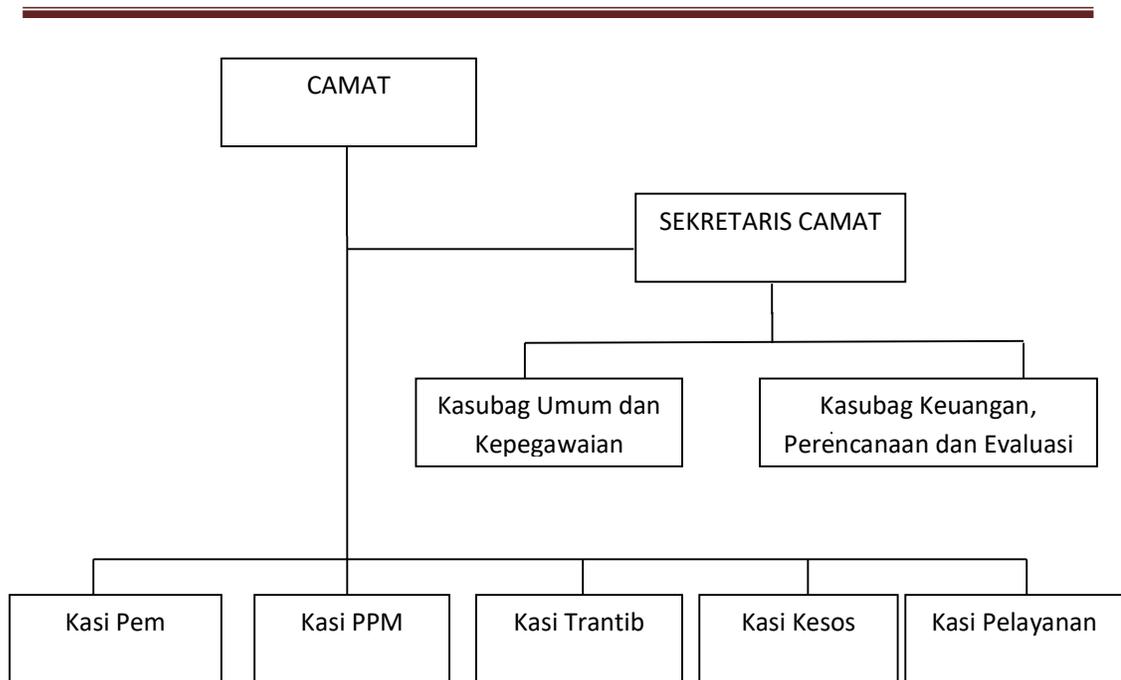
1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Bukik Barisan dapat di lihat pada tabel Struktur seperti dibawah ini :



1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Tabel : I. SUMBERDAYA MANUSIA

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1.	Pembina Tk I	IV/b	1	
2.	Pembina	IV/a	1	
3.	Penata Tingkat I	III/d	6	

4.	Penata	III/c	-	
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	
6.	Penata Muda	III/a	1	
7.	Pengatur Tk.I	II/d	1	
8.	Pengatur	II/c	2	
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	
10.	Pengatur Muda	II/a	-	

Jumlah

14 Orang

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Bukik Barisan tahun 2020)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	Sarjana Strata Dua (S2)	1	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	7	
3	Sarjana Muda	-	
4	SLTA	6	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	Jumlah	14	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Bukik Barisan)

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI.

Kecamatan Bukik Barisan berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
 - Belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan otonomi.
 - Rendahnya kapasitas pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah.
 - Masih rendahnya disiplin serta kinerja aparatur dalam pelayanan aparatur dan masyarakat.
 - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur.
 - Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.
 - Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
 - Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

-
- Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.
 - Belum maksimalnya Nagari dalam menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD
- 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN
- 3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2021.

2.1.1. VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan kata lain, "visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu". Visi dan misi OPD ini harus sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Visi :”Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

2.1.2. MISI

Misi menjawab pertanyaan ini: Mengapa organisasi ini ada? Misi adalah garis besar dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai / mempercepat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan strategi yang diterapkan di lingkungan kerja Kecamatan Bukik Barisan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai unit kerja induk bagi Kecamatan Bukik Barisan.

Dari Visi dan Misi Kabupaten tersebut dapat dijabarkan pula misi Kabupaten sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf/kualitas hidup Masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

-
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta Gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jompo, Bank Tanah Nagari, Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau, Mesjid, MDA, TPA/TPSA dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu, berprestasi, atlet dan mereka yang mengharumkan nama daerah.
 4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi seutuhnya dan jaminan Penjurangan Karir dan Kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan Pekerja Sosial Masyarakat.
 6. Peningkatan pembangunan berbasis Jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung padi nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
 7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat beragama.

-
8. Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi dengan mempersiapkan infrastruktur dan pererangkat lunak.
 9. Menghadirkan pengakuan, penghargaan dan kompensasi terhadap Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah basis PDRI 1948-1949 dan memiliki anak Nagari mempunyai andil dan jasa di Republik ini. Mengembalikan kedaulatan rakyat, baik kedaulatan bernegara, beragama maupun kedaulatan adat.

2.1.3. TUJUAN

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang harus dicapai. Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan Kecamatan Bukik Barisan yang telah ditetapkan sebagai penjabaran / implementasi dari Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan Bukik Barisan.
2. Meningkatkan peran Kecamatan Bukik Barisan dalam rangka koordinasi pemerintahan dan pembangunan di Nagari.
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sistim Pemerintahan Nagari dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.4. SASARAN

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan yang tertib dan dinamis, serta koordinasi dengan unit kerja lain yang lancar dan mantap dengan melibatkan masyarakat sehingga memperoleh data yang aktual dan faktual
- b. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dan partisipasi aktif aparatur pemerintah, masyarakat dan swasta pada berbagai aspek yang ada di kecamatan yang mendukung program Pemerintah sehingga tercipta Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset kecamatan yang berorientasi kepada kepentingan publik sehingga terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.

Tabel : 3 Perjanjian Kinerja tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KECAMATAN BUKIK BARISAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan	70
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan	5 nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	60%

4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%
---	--	--	-----

Program	Anggaran	
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	182.819.700
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	75.570.000
3 Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	9.900.000
4 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	15.484.000
5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp	9.672.000
6 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	44.022.000
7 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	26.271.000
8 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	48.220.000
JUMLAH	Rp	611.958.700

Tabel : 4 Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan	70
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan	5 nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	60%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%

Program	Anggaran	
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	112.842.472
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	56.863.000
3 Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	9.650.000
4 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	17.330.000
5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp	7.030.000
6 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	39.222.000
7 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	38.995.000
8 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	31.655.000
JUMLAH	Rp	313.587.472

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2020) sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 5. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut:

Tabel :6. Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Predikat
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan	70	66,41	94,87%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	89,00	98,88%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan	5 nagari	5 Nagari	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	60%	0%	0%	Sangat Rendah
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%	80%	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja 100 % dari Sasaran Strategis yang ada pada Indikator Kinerja Kecuali pada Pencapaian Realisasi APB Nagari						

* Jumlah seluruh Indikator Kinerja

** Jumlah Seluruh Sasaran Strategis

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan administrasi perkantoran.

Sasaran Starategis I

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan	80	70	65,64	70	66,41	

Sumber data : Nilai SAKIP Kec.Bukik Barisan Tahun 2019

a. Indikator Kinerja 2

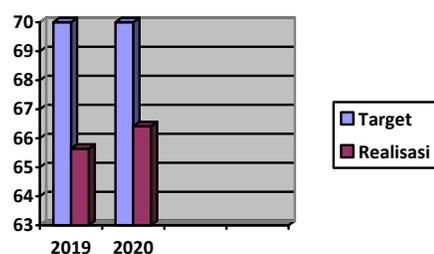
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan Realisasi dari Indikator Kinerja dengan nilai 66,41 yaitu dari target yang di rencanakan adalah nilai 70 dengan Persentase realisasi nilai SAKIP tahun 2020 94,87% hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan dan Nilai yang ada adalah nilai yang dilakukan untuk SAKIP tahun 2020 yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat pada pertengahan Tahun 2020.
2. Belum sesuainya penilaian SAKIP dengan tahun LKjIP yang dilaporkan.
3. Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai walau telah ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.
4. Menurut hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan yang dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020, penyebab tidak tercapainya

nilai penilaian SAKIP Kecamatan Bukik Barisan tahun 2020 adalah :

- Laporan Kinerja belum menyajikan analisis dari penggunaan sumberdaya tersebut dan sumberdaya lainnya
 - Hasil Evaluasi Program belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang
5. Sebagai penjelasan terhadap temuan kelemahan/penyebab tidak tercapainya target penilaian SAKIP Kecamatan Bukik Barisan tahun 2020 adalah :
- Laporan Kinerja belum menyajikan analisis dari penggunaan sumberdaya tersebut dan sumberdaya lainnya, hal ini sebenarnya telah di jelaskan dalam Renstra tahun 2016-2021 dan hal ini secara terbatas juga ada dalam renja dan laporan LKJP tahun 2020.
 - Hasil Evaluasi Program akan ditindak lanjuti sesuai dengan yang di rekomendasikan oleh inspektorat setelah penelaahan Permasalahan yang terjadi pada Program selesai dilakukan.

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2019 dan 2020



2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	88,93	80	89,00	

Sumber Data : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kec.Bukik Barisan tahun 2020

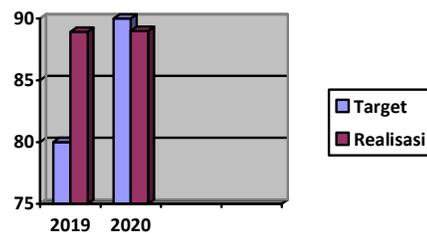
a. Indikator Kinerja 1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 89,00 yaitu dari target yang di rencanakan adalah 90 dengan persentase realisasi 88,93% hal ini dikarenakan :

1. Realisasi survei IKM telah dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2020 dengan 77 orang Responden.
2. Pelayanan terhadap Masyarakat untuk pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilakukan dengan optimal.
3. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan terus ditingkatkan dengan anggaran yang tersedia.

Grafik 2: Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 dan 2020





Gambar 1: Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bukik Barisan

3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan	5 Nagari	4 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	80 %	40%	40%	60%	0%	

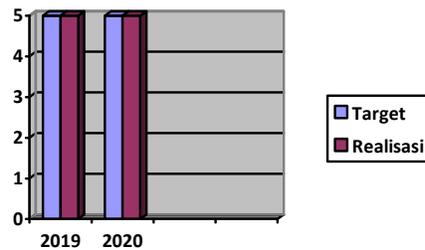
Sumber Data : 1. Indikator 1 : Keputusan Direktur Jenderal PPMD Nomor 303 tahun 2020
2. Indikator 2 : Data Monitoring Nagari Oleh Kasi PMN Kec.Bukik Barisan

a. Indikator Kinerja 1

Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan adalah 5 Nagari, Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 5 Nagari yaitu 100 % dari target yang ditetapkan, hal ini dapat tergambar pada tabel berikut;

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Banja Loweh	Berkembang
2	Maek	Berkembang
3	Koto Tengah	Maju
4	Sungai Naniang	Berkembang
5	Baruah Gunung	Maju

Grafik 3: Target dan Realisasi Status Nagari 2019 dan 2020



Realisasi tersebut lebih tinggi dari target yang di rencanakan adalah 5 Nagari realisasi 100% hal ini dikarenakan :

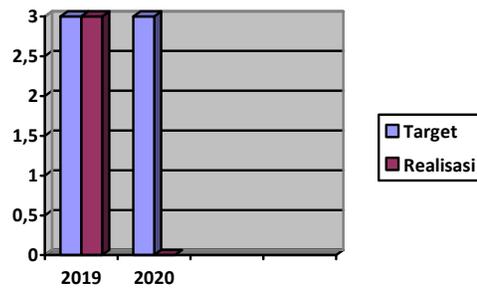
1. Nagari yang telah berkembang di Kecamatan Bukik Barisan pada tahun 2020 telah berjumlah 5 nagari.
 2. Optimalisasi terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Bukik Barisan untuk pembedayaan dan Pembangunan Nagari.
 3. Optimalisasi atas anggaran untuk pemberdayaan dan monitoring evaluasi di Nagari.
- b. Indikator Kinerja 2

Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu. Realisasi dari Indikator Kinerja adalah tidak ada nagari yang menyelesaikan APB nagarinya tepat Waktu

atau 0% dari Jumlah nagari yang ada. Hal ini dikarenakan :

1. APB Nagari disusun atas musyawarah antara pemerintahan Nagari dengan Bamus Nagari, ketidaksesuaian antara Bamus dan pemerintahan menghambat realisasi selesainya APB tepat waktu.
2. Kurang Optimalnya terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Bukik Barisan untuk Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur nagari.
3. Kurang Optimalnya pemanfaatan Anggaran yang memadai dari Anggaran APBD Lima Puluh Kota yang dialokasikan di Nagari.
4. Belum keluarnya Pagu anggaran APB nagari dari DPMDN yang akan disusun oleh nagari, sehingga tidak dapat disusun sesuai dengan jadwal yang ada.

Grafik 4: Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB tepat Waktu 2019 dan 2020.





Gambar 2 : Rapat Koordinasi antara Camat dengan Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat tentang perkembangan Nagari.



Gambar 3: Pendampingan Penyusunan APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan Bukik Barisan.

4. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari
Sasaran Strategis IV

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%	50%	80%	80%	80%	

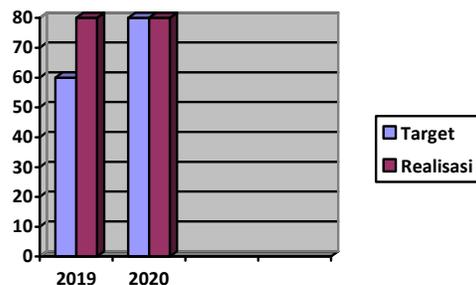
Sumber Data : Data Seksi DPMN Kecamatan Bukik Barisan

a. Indikator Kinerja 1

Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif .Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 80% yaitu ada 4 (empat) Nagari yang Bumnagnya aktif yaitu Nagari Maek, Nagari Koto Tengah, Nagari Sungai Naniang dan Nagari Baruah Gunung. Hal ini adalah 100% dari target yang di rencanakan adalah 80% telah direalisasikan realisasi 80% hal ini dikarenakan :

1. Optimalnya pembinaan terhadap Nagari dan Bumnag nagari.
2. Optimalisasi terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Bukik Barisan untuk Pembinaan dan Pemberdayaan.
3. Dukungan Aparatur nagari dan Instansi terkait dalam mewujudkan Optimalisasi Perkembangan Badan Usaha Nagari.
4. Optimalisasi Anggaran Anggaran yang tersedia.

Grafik 5: Target dan Realisasi badan Usaha Nagari yang aktif Tahun 2019 dan 2020.





Gambar 4: Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Banja
Loweh Bidang Usaha Perternakan.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Bukik Barisan pada tahun 2020 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, bahkan ada indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

3.1.1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yakni:

- ✓ Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari Aparatur Sipil Negara yang ada.

-
- ✓ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah ada, Pemerintah Nagari dan Unsur-unsur masyarakat.
 - ✓ Sarana dan prasarana penunjang yang di upayakan untuk di optimalkan.
 - ✓ Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
 - ✓ Dukungan anggaran yang mencukupi.

3.1.1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya dengan sumber daya yang ada, menghindari yang pemborosan anggaran dan dengan Sumber Daya Manusia Kantor Camat yang jumlahnya terbatas.

3.1.1.c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- ✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan makanan dan Minuman
- ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

sebagai berikut:

- ✓ Pengadaan Bebeleur
- ✓ Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
- 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
- 5. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut.
- ✓ Pemberdayaam lembaga dan organisasi masyarakat desa
- 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- ✓ Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
- 7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- ✓ Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
- 8. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- ✓ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan peningkatan pelayanan publik
- ✓ Bimbingan superfisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan Nagari LKPJ dan Publik
- ✓ Bimbingan supevisi dan pengawasan dana nagari
- ✓ Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- ✓ Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial, raskin dan kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan program/ kegiatan tersebut nampak masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan pencapaian terkait dengan pencapaian indikator kinerja, yakni optimalisasi pelayanan yang perlu dimunculkan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga kegiatan pembinaan sesuai bidang yang ada seperti pemerintahan nagari, keuangan nagari dan pemberdayaan nagari.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Bukik Barisan pada tahun 2020 sudah memenuhi target, yakni 100 % Kecuali Capaian Kinerja Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu yang tingkat capaian kinerjanya 0%.

3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN

Dibawah ini terurai Efisiensi anggaran

Tabel : 7. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN/PROGRA M/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KET (EFESIENSI)
			REALISASI ANGGARAN Rp	% KEUAN GAN	% FISIK	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	112.842.472	112.494.362	99,69	100,00	Efisiensi
1	Penyediaan jasa surat menyurat	390.000	390.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.220.000	1.994.362	89,84	100,00	Efisiensi
3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	49.100.000	49.100.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.088.000	15.968.000	99,25	100,00	Efisiensi
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	950.000	950.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.998.672	9.998.000	99,99	100,00	Efisiensi
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.498.800	7.497.000	99,98	100,00	Efisiensi

8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.190.000	2.190.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
9	Penyediaan Makanan dan minuman	6.750.000	6.750.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	17.657.000	17.657.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	56.863.000	55.747.300	97,66	100,00	Efisiensi
1	Pengadaan Mebeleur	6.300.000	6.300.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.563.000	49.447.300	97,79	100,00	Efisiensi
03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.650.000	9.650.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.650.000	9.650.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
04	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	17.330.000	16.715.000	96,45	100,00	Efisiensi
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	17.330.000	16.715.000	96,45	100,00	Efisiensi

05	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	7.030.000	7.015.000	99,79	100,00	Efisiensi
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	7.030.000	7.015.000	99,79	100,00	Efisiensi
06	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	39.222.000	38.142.000	97,25	100,00	Efisiensi
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	39.222.000	38.142.000	97,25	100,00	Efisiensi
07	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	38.995.000	38.990.000	99,99	100,00	Efisiensi
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	38.995.000	38.990.000	99,99	100,00	Efisiensi
08	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	31.655.000	31.635.000	99,94	100,00	Efisiensi
1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	6.980.000	6.980.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi
2	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	9.455.000	9.455.000	100,00	100,00	Tidak ada Efisiensi

3	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	8.300.000	8.280.000	99,76	100,00	Efesiensi
4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.	6.920.000	6.920.000	100,00	100,00	Tidak ada Efesiensi
	JUMLAH	313.587.472	310.388.662	98,98	100,00	24.460.400

3.5. REALISASI ANGGARAN

Dibawah ini terurai pagu anggaran awal, pagu anggaran perubahan dan realisasi anggaran tahun 2020:

Tabel : 7. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PERUBAHAN
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	207.920.900	220.820.900	214.123.520
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000	3.900.000	2.334.420
3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	62.600.000	62.600.000	55.455.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan	16.278.000	21.868.000	21.868.000

	Kantor			
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.540.000	2.540.000	2.540.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.635.900	12.235.900	12.235.900
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.398.000	7.418.000	7.418.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.290.000	2.380.000	2.380.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	5.675.000
10	Penyediaan Makanan dan minuman	26.000.000	28.500.000	28.500.000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	73.979.000	73.979.000	73.817.200
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	75.850.000	101.350.000	98.978.980
1	Pengadaan Mebeleur	15.700.000	41.200.000	40.375.000

2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.150.000	60.150.000	58.603.980
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.400.000	7.000.000	7.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8.400.000	7.000.000	7.000.000
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.745.000	22.745.000	22.695.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	22.745.000	22.745.000	22.695.000
05	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	79.435.000	58.065.000	55.185.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	79.435.000	58.065.000	55.185.000

06	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	16.185.000	12.235.000	12.220.000
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	16.185.000	12.235.000	12.220.000
07	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	76.500.000	59.820.000	55.670.000
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	76.500.000	59.820.000	55.670.000
08	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	33.785.000	33.785.000	33.775.000
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	33.785.000	33.785.000	33.775.000
09	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	81.874.000	81.874.000	78.587.000

1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	27.150.000	27.150.000	24.048.000
2	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	24.715.000	24.715.000	24.680.000
3	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	16.335.000	16.335.000	16.260.000
4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.	13.674.000	13.674.000	13.599.000
	JUMLAH	602.694.900	602.694.900	578.234.500

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Kecamatan Bukik Barisan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Empat sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2020 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan, adapun beberapa pelaksanaan kegiatan pada sasaran tersebut tidak didukung oleh anggaran, namun Kecamatan Bukik Barisan secara maksimal berusaha mencapai target capaian kinerja pada kegiatan tersebut.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sudah dapat dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan harapan.

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

Disadari bahwa selama Tahun 2020 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Bukik Barisan mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Persoalan minimnya anggaran untuk tahun 2020 dibandingkan dengan anggaran tahun 2018 dan 2019 setelah

adanya Refocusing anggaran untuk penanganan Wabah Covid 19 yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota Khususnya dan Umumnya di Indonesia, akan disikapi dengan bijaksana dan berusaha tetap menjalankan setiap program dan kegiatan yang ada seoptimal mungkin dengan melakukan efesiansi penggunaan anggaran terutama beberama mata anggaran yang perlu diefisienkan.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Bukik Barisan akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tataran.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN

Alamat : Jalan raya Limbanag-Maek KM 4 Tlp (0752) 748884 Banja Loweh KP 2655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARDI,S.Pd.M.Pd**
Jabatan : CAMAT BUKIK BARISAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IRFENDI ARBI**
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Banja Loweh, Januari 2020
Pihak Pertama
CAMAT BUKIK BARISAN

WARDI,S.Pd,M.Pd

NIP.19651220 198603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN BUKIK BARISAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan	70
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan	5 nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	60%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%

Program	Anggaran
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 182.819.700
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 75.570.000
3 Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 9.900.000
4 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp 215.484.000
5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp 9.672.000
6 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 44.022.000
7 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 26.271.000
8 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 48.220.000

JUMLAH

Rp 611.958.700

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI

Banjarlينه, Januari 2020

CAMAT



WARDI, S.Pd, M.Pd

NIP.19651220 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN

Alamat : Jalan raya Limbanag-Maek KM 4 Tlp (0752) 748884 Banja Loweh KP 2655

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARDI,S.Pd.M.Pd**
Jabatan : CAMAT BUKIK BARISAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IRFENDI ARBI**
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Banja Loweh, November 2020
Pihak Pertama
CAMAT BUKIK BARISAN

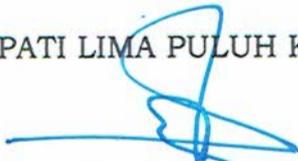
WARDI,S.Pd,M.Pd
NIP.19651220 198603 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN BUKIK BARISAN**

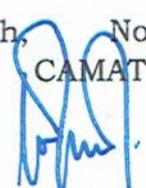
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan	70
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan	5 nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	60%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%

Program	Anggaran
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 112.842.472
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 56.863.000
3 Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 9.650.000
4 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp 17.330.000
5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp 7.030.000
6 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 39.222.000
7 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 38.995.000
8 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 31.655.000
JUMLAH	Rp 313.587.472

BUPATI LIMA PULUH KOTA


IRFENDI ARBI

Banja loweh, November 2020


CAMAT
WARDI, S.Pd, M.Pd
NIP.19651220 198603 1 003